

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan suatu proses pelaporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan segala transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Dalam hal ini laporan keuangan diperuntukkan untuk membandingkan realisasi belanja, pendapatan, transfer dan segala pembiayaan. Laporan keuangan dimana penyusunannya berpedoman dalam standar akuntansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan sehingga suatu laporan keuangan yang dimaksudkan mampu meningkatkan kredibilitas dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintahan daerah. Laporan keuangan terutama memiliki fungsi dimana untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi dimana diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Standar Akuntansi Keuangan). Laporan keuangan tergolong komponen penting untuk kinerja finansial pemerintah daerah. Begitu pentingnya laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hal ini seperti dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) menurut Makka et al., (2015) merupakan “salah satu laporan pertanggungjawaban paling utama dimana memberikan informasi mengenai realisasi anggaran serta untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran”. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, indikasi perolehan dan sumber daya ekonomi termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran APBN/APBD. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran berperan sangat penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian serta penilaian kinerja. Berdasarkan LRA tersebut memuat informasi yang menyeluruh sehingga pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya.

Penelitian ini menekankan pada analisis kinerja belanja daerah dimana analisis kinerja belanja merupakan suatu sistem pengukuran hasil dari pengeluaran kas umum daerah dimana mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu periode pelaporan. Analisis kinerja belanja suatu sistem pengukuran hasil dari pengeluaran kas umum daerah dimana mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan penelitian Mangantar (2018) mendefinisikan penilaian kinerja bahwa “penilaian kinerja merupakan rancangan, pengumpulan dan evaluasi bukti yang cukup relevan dengan material, kompeten melalui pemeriksaan bebas yang bertujuan untuk menentukan apakah manajemen atau karyawan unit bisnis telah atau menerima dan pelaksanaan prinsip akuntansi, kebijakan manajemen, atau operasional”. Berdasarkan penelitian Idris et al., (2019) mengatakan bahwa “analisis kinerja belanja berguna mengetahui seberapa besar pemerintah

daerah mampu mencapai realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dan seberapa besar pertumbuhannya”. Belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran salah satu komponen yang sangat penting dimana mengundang banyak perhatian publik karena berkepentingan untuk mengetahui apakah dana digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Ratnasari (2019) berpendapat sebagai berikut:

Penekanan pada belanja menjadi titik perhatian karena pada sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran selain itu belanja daerah mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Hal ini disebabkan karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam LRA, analisis terhadap kinerja belanja pun harus dilakukan untuk menjadi dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke masa depan.

Pengukuran kinerja diawali dengan proses penentuan indikator kinerja yang memberikan informasi yang diberikan oleh indikator-indikator tersebut sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menghasilkan keluaran dan hasil bagi masyarakat. Pengukuran kinerja membantu dalam pengambilan keputusan dalam memantau dan meningkatkan kinerja dan fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Menurut Palilingan et al., (2015) mendefinisikan manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut:

Manfaat pengukuran kinerja memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,

membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta merupakan lembaga atau instansi pelayanan publik yang bertugas dalam pengelolaan keuangan baik pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini sangatlah penting bagi BPPKAD Kota Surakarta untuk melakukan berbagai analisis penggunaan anggaran dan belanja. Analisis ini diperuntukkan untuk menilai dan mengevaluasi apakah kegiatan belanja daerah terlaksana dengan efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya. Dalam penelitian kinerja belanja dapat diketahui anggaran yang ada dan berapa realisasinya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan belanja pada BPPKAD kota Surakarta selama masa anggaran tersebut.

Pada tahun 2020 anggaran belanja BPPKAD Kota Surakarta dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengalami penurunan, hal ini berbeda dengan tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp 2.091.964.585.155 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.197.454.843.803 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 1.886.698.244.826. Penurunan tersebut diakibatkan terjadinya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat hal ini diutarakan dalam pidato walikota Surakarta. Dengan adanya penurunan tersebut dapat memicu tidak berlangsungnya dengan mulus pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada BPPKAD Kota Surakarta pada tahun 2020.

Subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. BPPKAD dipilih sebagai subjek karena sebagai badan/instansi yang mengolah keuangan daerah baik itu pendapatan maupun belanja serta BPPKAD menyajikan laporan secara umum dari Pemerintah Kota Surakarta. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta telah dan sudah berupaya untuk menyesuaikan perubahan-perubahan kondisi dan perkembangan dalam

penyusunan anggaran belanja tetapi tidak dengan mengabaikan pengukuran kinerja belanja. Karena terdapat beberapa hambatan yang menjadikan sistem dari penganggaran belanja menjadi kurang efektif karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola pada proses perencanaan anggaran itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin menganalisis dan mendiskripsikan kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dari Tahun Anggaran (TA) 2018-2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada era globalisasi saat ini.

### b. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat terhadap pemerintah daerah di Kota Surakarta dalam melihat kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

### c. Bagi Peneliti

Digunakan sebagai sarana dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan ilmu akuntansi kedepannya berkaitan dengan kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi pendidikan Akuntansi.